

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akerlof, Shiller. *Phishing For Phools : The Economic of Manipulation & Deception*, United Kingdom : Princeton University Press. 2015.
- Alfitra. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern (Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat)*. Ponorogo : Wade Group.2017.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press. 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Askin, M., Cahaya, S. *Hukum Acara Pidana di Luar KUHP*. Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia. 2011.
- Atmasasmita, Romli, Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya : Laksbang Justisia. 2019.
- Bastiat, Frederic. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, terj. Zaim Rofiqi. Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org. 2010.
- BJ, Abdui Muis. *Pemberantasan Korupsi: Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2020.
- Boardman, Anthony E.. *Cost Benefit Analysis: Concepts and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2018.
- Butarbutar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi ; Gramata Publishing. 2016.
- Cooter, Robert, Thomas Ulen. *Law and Economics*. London: Pearson Addison Wisley. 2008.

- Conboy, Maria G.S.. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nasional: Kumpulan Tulisan dan Pemikiran 2014-2021*. Jakarta: Diadit Media. 2022.
- Concil of Europe. *Impact Study on Civil Forfeiture*. Belgrade: Council of Europe Office in Belgrade. 2013.
- de Deo, Robert. *Master Chef 314: Who Cooked Money Laundering Cases*. Jakarta: Aspol Pondok Karya. 2017.
- Dermawan, M.,K., Oli'i, M.I.. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Fisip UI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Friedman, Lawrence M.. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terj.* Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. 2001.
- Friedman, Lawrence M.. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. 2009.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Gunawan. *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana,. 2018.
- Herimulyanto, Agustinus. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: GENTA Publishing. 2019.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.2018.
- Hutauruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Iskandar, Amiati M.. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta. 2013.
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta: Prenadamedia. 2015.
- Kaligis, O.C..*Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2011.

- Kartayasa, Mansyur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Kadmasasmita, Achmad Djuoeni. *Kekakuan dalam Pelaksanaan Performance Budgeting di Indonesia*. Jakarta: LPFE UI. 2006.
- Kennedy, Roberts. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2017.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.
- Kurniawan, Ardeno. *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*. Yogyakarta: BPF. 2015.
- Keynes, John Maynard. *A Tract on Monetary Review*. New York: Prometheus Books. 2000.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006.
- Mackaay, Ejan. *Law and Economics for Civil Law Systems*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. 2013.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.
- Marbun, Rocky. *Politik hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*. Malang: Setara Press. 2019.
- Marusic, Andreja, Branko Radulovis. *Regulatory Impact Analysis (RIA) Manual*. Podgorica: USAID-Good Governance Activity in Montenegro. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Miller, Gerald J., Donijo Robbins. "Analisis Biaya-Manfaat." *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode, terj.* Imam Baihaqi. Bandung: Nusamedia. 2014.
- Mozi. *The Book of Master Mo, terj.* Ian Johnston. London: Penguin Classics. 2010.

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2009.
- Pejovich, Svetozar, Enciro Colombatto. *Law, Informal Rules and Economic Performance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2008.
- Purba, Bona. *Fraud dan Korupsi : Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kiranatama. 2015.
- Rae, Gradios Nyoman Tio. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada. 2020.
- Ravena, D., Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Eksaminasi Publik sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum* dalam Susanti Adi Jugroho et al, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: ICW. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Samekto, F.X. Adji. *Justice Not for All: Kritik Terhadap Modern dalam Perspektif Hukum Kritis*. Yogyakarta: Gentra Press. 2008.
- Santoso, Ibnu. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- Satriana, Eri. *Aset Recovery dalam Pengembalian Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Keni Media. 2019.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. 2009.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga. 1976.
- Setya, Agung. *Polisi Mengantar Ayam Hilang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Soeria Atmadja, Arifin P.. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1986.
- Soetopo, Maria. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM* Bahan Paparan Program Magister Hukum Universitas Indonesia tanggal 19 dan 26 Oktober 2020., Jakarta: Universitas Pelita Harapan-Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2020.
- Sofian, Achmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

2018.

Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Kencana. 2014.

Suhartoyo. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*. Depok: Rajawali Press. 2019.

Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang: Setara Press. 2015.

Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2011.

Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Topo, Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Manual on International Cooperation for the Purpose of Confiscation of Proceeds of Crime*. Vienna: United Nations Office. 2012.

Van den Broek, Melissa. *Preventing Money Laundering*. Netherlands: Eleven International Publishing. 2015.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press. 2013.

Perundang-undangan/Peraturan

Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkan dalam Berita RI Tahun II No.7.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut amandemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981/76 Nomor 3209.

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108.

Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Convention Against Corruption*, 2003.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Jurnal

Dandel, Daniello, "Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10, Edisi Desember 2018.

Datuan, M., S., Nasution, B., Mulyadi, M., Siregar, M., "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum USU*, Vol.5, No. 2, April 2017. 2017 : 95-102.

Deddy Candra, Arfin, "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional", *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No. 1. 2018

Hadiyono, V. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Unika*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.

Isyunanda, Kristianus Pramudito. "Pemanfaatan Law and Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum di Indonesia." *Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1. 2022: 125-160.

Julyanto, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019. 2019: 13-22.

Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. 2017: 148-163.

Manik, Jeanne Darc Noviayanti, "Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 3, 2018, Jakarta: Universitas Trisakti.

Muh. Naseh, Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandanu, Beny Bathara, 2019, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional

Terorganisasi di Indonesia dan Eropa”, *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, Yogyakarta, Vol. 8, No. 1, April-September 2019 .

Pakpahan, R., H., Firdaus, A., “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, September 2019. 2019: 369-378.

Prakarsa, A., Yulia, R., “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Rezawan, M. Edo, Sandhi Permana, Yunita Kurnia Dewi. “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi.” *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 2. 2014: 183-195.

Saputra, Rony, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 , 2016: 103 – 119.

Siagian, Santi Laura, Pujiyono dan Sukinta, “Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Sibuea, Harris Y.P.. “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 18/P3DI/September/2014. 2014: 1-4.

Wedha, Y.,Y., Darma, I., M., W., “Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2, Edisi September 2018.

Widyaningrum, Hesti, “Penyitaan oleh Penyidik KPK terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi ”, *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, Vol. 15, No. 1, Mei 2015.

Tugas Akhir dan Penelitian

Bayu Aji, Rihantoro. “Prinsip Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Disertasi*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

- Ginting, Jamin. "Disharmoni Peran Lembaga-Lembaga Negara Mengakibatkan Macetnya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Assets Recovery in Indonesia)." *Disertasi*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan. 2010.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Reformasi Regulasi: Analisa Dampak Kebijakan UMKM untuk Pembangunan Ekonomi." *Laporan Kegiatan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018.
- Sanjaya, Roy. "Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2020.
- _____. "Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2021.
- Sarel, Roe. "Crime and Punishment in Times of Pandemics." *Penelitian*. New York: Social Science Research Network. 2021.
- Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. "Laporan Analisa Pendahuluan CBA dan RIA Dampak Sistem Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Evaluasi Regulasi Kepemiluan." *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020.
- Wagiman. "Implementasi Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Disertasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2015.
- Yusuf, Muhammad. "Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2012.

Bahan Kuliah dan Paparan

- Husein, Yunus. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) dan Corporate Criminal Liability." *Paparan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. 2017.
- Simatupang, Dian Puji N.. "Hak Menguasai Negara dalam Keuangan Publik: Konsep, Teori dan Praktik." *Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.

Internet

- Adhey. “Sel Irjen Napoleon Tak Digembok, Polri Akui Pelaku Disegani Petugas Tahanan.” <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2021/09/21/sel-irjen-napoleon-tak-digembok-polri-akui-pelaku-disegani-petugas-tahanan/>. 21 September 2021.
- Aditya, Yoga. “Konsep ‘Veil of Ignorance’ dalam Perumusan Konstitusi, Apa Itu?.” <https://www.gatra.com/news-522690-hukum-konsep-veil-of-ignorance-dalam-perumusan-konstitusi-apa-itu.html>. 14 September 2021.
- Aryan, Muhammad Hanafi. “Dicicil 3 Kali, Juliari Batubara Lunasi Uang Pengganti Rp 14,5 M ke Negara.” <https://news.detik.com/berita/d-6209655/dicicil-3-kali-juliani-batubara-lunasi-uang-pengganti-rp-145-m-ke-negara>. 1 Agustus 2022.
- BBC Indonesia. “Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak – Terpaksa Kami Olah, Karena itu yang Kami Dapatkan.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>. 23 Agustus 2021.
- Bachri, Syaeful. “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.” https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=888:patrialis-dukung-pemiskinan-koruptor&catid=111&Itemid=179. 17 November 2010.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. “Faktor Penyebab Korupsi.” <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-faktor-penyebab-korupsi/detail/>. 30 Desember 2020.
- Baskailakhin, Akhmad. “Arti Keadilan Sosial di Mata Kaum Milenial.” <https://umg.ac.id/index.php/opini/31>. 20 Februari 2022.
- Bbc.com. “Dugaan Suap Hakim Agung: Persidangan MA yang Tertutup ‘Jadi Celah Permainan Perkara’, KPK Diminta Usut Potensi Keterlibatan Hakim Lain.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n0yxz00dko>. 26 September 2022.
- Bayu, Dimas. “Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 62,93 Triliun pada Tahun 2021.” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>. 24 Maret 2022.
- Bekasimedia.com. “Inilah 4 Kasus Korupsi Terbesar Era Orde Reformasi.” <https://bekasimedia.com/2019/03/22/inilah-4-kasus-korupsi-terbesar-era-orde-reformasi/>. 22 Maret 2019.
- Damayana, Gita Putri. “Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang.” <https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/>. 13 November 2014.

- Desyana, Cornila, *et. al.*. “Pembuktian Terbalik Permudah Pekerjaan Penyidik.” <https://nasional.tempo.co/read/316143/pembuktian-terbalik-permudah-pekerjaan-penyidik>. 26 Februari 2011.
- Detik.com. “KPK: Anggaran Negara Bocor Hingga 40% Sejak Zaman Soemitro.” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-975259/kpk-anggaran-negara-bocor-hingga-40-sejak-zaman-soemitro>. 21 Juli 2008.
- Diansyah, Febri. “Jalan Terjal Pemiskinan Koruptor.” <https://antikorupsi.org/id/article/jalan-terjal-pemiskinan-koruptor>. 6 Maret 2012.
- Djuwana, Hikmahanto. “Ihwal Kerugian Negara.” <http://www.mudjisantosa.net/2015/03/ihwal-kerugian-negara-hikmahanto-juwana.html>. 7 Maret 2015.
- Dlilah, Chuz F.. “7 Dampak Masif Korupsi.” https://www.academia.edu/12324455/7_DAMPAK_MASIF_KORUPSI. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Dpr.go.id. “Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Beracara yang Usang.” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39477/t/Perlu+Direvisi%2C+UU+KUHAP+Masih+Berorientasi+Proses+Beracara+yang+Usang>. 23 Juni 2022.
- Dw.com. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok ke Ranking 102.” <https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>. 28 Januari 2021.
- Ferdiansyah, Benardy. “ICW Nilai Pemiskinan Koruptor Lebih Beri Efek Jera.” <https://www.antaraneews.com/berita/2005005/icw-nilai-pemiskinan-koruptor-lebih-beri-efek-jera>. 17 Februari 2021.
- Halim, Devina. “Temukan Sel Mewah Koruptor, Ombudsman Minta Lapas Terapkan Standar.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/22/16035621/temukan-sel-mewah-napi-koruptor-ombudsman-minta-lapas-terapkan-standar?page=all>. 22 Desember 2019.
- Hanggoro, Hendaru Tri. “Empat Kasus Korupsi Besar pada Awal Orde Baru.” <https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm>. 31 Desember 2018.
- Ihsanuddin. “Kronologi Novanto Tersangka Hingga Status Tersangkanya Dibatalkan.” <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan>. 30 September 2017.
- Indonesia Corruption Watch. “Menyoal Dugaan Perkara Hukum Lukas Enembe: Sengkarut Korupsi Politik dan Menguji Nyali KPK.”

<https://antikorupsi.org/id/menyoal-dugaan-perkara-hukum-lukas-enembe-sengkarut-korupsi-politik-dan-menguji-nyali-kpk>. 22 September 2022.

_____. “Praperadilan, Masihkah Penting?” <https://antikorupsi.org/id/article/praperadilan-masihkah-penting>. 18 Februari 2005.

_____. “Ruwet, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.” <https://antikorupsi.org/id/article/ruwet-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>. 2 November 2006.

_____. “Vonis Ringan Nurhadi: Pengadilan Tinggi Harus Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor.” <https://antikorupsi.org/id/article/vonis-ringan-nurhadi-pengadilan-tinggi-harus-membatalkan-putusan-pengadilan-Tipikor>. 21 Maret 2021.

Indraini, Anisa. “Terkuak! Asal Mula Skandal BLBI Hingga Jadi beban Negara 22 Tahun.” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5698851/terkuak-asal-mula-skandal-blbi-hingga-jadi-beban-negara-22-tahun>. 27 Agustus 2021.

Institute for Criminal Justice Reform. “Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara.” <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>. 1 Juli 2019.

Kbbi.co.id. “Korupsi.” <https://kbbi.co.id/cari?kata=korupsi>. Tanpa tanggal, tanpa tahun.

Khafifah, Nur. “Fadli Zon: Korupsi Justru Jadi ‘Oli’ Pembangunan.” <https://news.detik.com/berita/d-2929613/fadli-zon-korupsi-justru-jadi-oli-pembangunan>. 30 Mei 2015.

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. “Tribata dan Catur Prasetya serta Panca Prasetya Korpri.” <https://kalsel.polri.go.id/web/tribrata-dan-catur-prasetya/#:~:text=Jadi%20Tri%20Brata%20berarti%20tiga,setiap%20anggotanya%20secara%20sungguh%2Dsungguh>. Tanpa tanggal, tanpa tahun.

Kompas.com. “Dugaan Suap di Pusaran Kasus Ferdy Sambo.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/10072021/dugaan-suap-di-pusaran-kasus-ferdy-sambo>. 16 Agustus 2022.

_____. “Ini Alasan Pengadilan Tinggi Kukuhkan Vonis Seumur Hidup Akil Mochtar.” <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/19484311/Ini.Alasan.Pengadilan.Tinggi.Kukuhkan.Vonis.Seumur.Hidup.Akil.Mochtar>. 26 November 2014.

_____. “Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu>. 4 April 2022.

- _____. “Nawa Cita’, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.” <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>. 21 Mei 2014.
- Koran Sindo. “Sel Mewah Koruptor.” <https://nasional.sindonews.com/berita/1324097/16/sel-mewah-koruptor>. 23 Juli 2018.
- Koran Tempo. “Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe.” <https://kolom.tempo.co/read/1638342/dosa-jakarta-di-kasus-korupsi-lukas-enembe>. 26 September 2022.
- Martiar, Norbertus Arya Dwiangga, Nikolaus Harbowo. “Pemiskinan Korupsi Lebih Ideal.” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/08/pemiskinan-koruptor-lebih-ideal>. 8 Desember 2021.
- Muftafidah, Ella. “Dampak Korupsi.” <https://www.kompasiana.com/elamuftafidah/581f1f0b6ea834d2058b4567/dampak-korupsi>. 26 November 2016.
- Mukhtar, Umar. “Beda Korupsi Era Orde Baru dan Reformasi.” <https://republika.co.id/berita/p92hev430/>. 21 Mei 2018.
- Nov. “Akil Sembunyikan Uang di Perusahaan Hingga di Balik Dinding.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/akil-sem-bunyikan-uang-di-perusahaan-hingga-di-balik-dinding-lt530742b9b75d0>. 21 Februari 2014.
- Polri.go.id. “Visi dan Misi POLRI.” <https://polri.go.id/visimisi>. Tanpa tanggal, tanpa tahun.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Ultimatum Remedium Sebagai Sanksi Pamungkas.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimatum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59>. 15 Juli 2022.
- Priasmoro, Muhammad Radityo. “Perjalanan Kasus Korupsi Romahurmuziy, Dituntut 4 Tahun Hingga Berakhir 1 Tahun Bui.” <https://www.liputan6.com/news/read/4241568/perjalanan-kasus-korupsi-romahurmuziy-dituntut-4-tahun-hingga-berakhir-1-tahun-bui>. 30 April 2020.
- Putra, Dwi Aditya. “Sitaan Aset BLBI Capai Rp 22,67 Triliun per 22 Juni 2022.” <https://tirto.id/sitaan-aset-blbi-capai-rp2267-triliun-per-22-juni-2022-gtdz>. 22 Juni 2021.
- Putri, Restu Diantina. “Mahfud: Kerugian Negara Akibat Kasus BLBI Hampir Rp 110 Triliun.” <https://tirto.id/mahfud-kerugian-negara-akibat-kasus-blbi-hampir-rp110-triliun-gccN>. 12 April 2021.

- Putri, Zunita. “Jejak Zumi Zola Tersandung 2 Kasus di KPK Hingga Bebas Bersyarat.” <https://news.detik.com/berita/d-6277082/jejak-zumi-zola-tersandung-2-kasus-di-kpk-hingga-bebas-bersyarat>. 7 September 2022.
- Rs-Lawyers.id. “Adagium Hukum yang Wajib Dipahami Arti dan Maknanya.” <https://www.rs-lawyer.id/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/>. 8 Desember 2020.
- Rachman, Dylan Aprialdo. “Setya Novanto, Sempat Pasrah Divonis 15 Tahun Akhirnya Ajukan PK.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/06144271/setya-novanto-sempat-pasrah-divonis-15-tahun-akhirnya-ajukan-pk>. 29 Agustus 2019.
- Ramadhan, Ardito. “Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/19262741/kasus-korupsi-alkes-tubagus-chaeri-wardana-alias-wawan-divonis-4-tahun>. 16 Juli 2020.
- Ramadhan, Azhar Bagas. “KPK Koordinasi dengan Bareskrim Soal Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto.” <https://news.detik.com/berita/d-5979183/kpk-koordinasi-dengan-bareskrim-soal-dugaan-pencucian-uang-setya-novanto>. 11 Maret 2022.
- Retno, Devi. “Sejarah Terbentuknya Polri Paling Lengkap.” <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>. 10 Juni 2019.
- Saputra, Andi. “MA Sunat Vonis Eks Pegawai Pajak Dhana Widyatmika.” <https://news.detik.com/berita/d-3386830/ma-sunat-vonis-eks-pegawai-pajak-dhana-widyatmika>. 3 Januari 2017.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.” <https://acch.kpk.go.id/en/riset-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>. 2017.
- Savitri, Isma. “Harta Rp 64 Miliar Bahasyim Dirampas Negara.” <https://nasional.tempo.co/read/310796/harta-rp-64-miliar-bahasyim-dirampas-negara>. 2 Februari 2011.
- Slamet, Budiman. “Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigatif.” <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000>. 2 Desember 2013.
- Tempo. “Divonis 15 Tahun Penjara, Setya Novanto Mengaku Stres.” <https://kabar24.bisnis.com/read/20180427/16/789306/divonis-15-tahun-penjara-setya-novanto-mengaku-stres>. 27 April 2018.

- Tim TvOne. “Mengenal Ratu Atut Chosiyah, Mantan Gubernur Banten yang Dipenjara Karena Suap Ketua MK Akil Mochtar dan Korupsi Alkes.” <https://www.tvonenews.com/berita/66107-mengenal-ratu-atut-chosiyah-mantan-gubernur-banten-yang-dipenjara-karena-suap-ketua-mk-akil-mochtar-dan-korupsi-alkes>. 8 September 2022.
- Tjandra, W. Riawan. “Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN.” <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>. 1 Oktober 2014,
- Tobing, Letizia. “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-genralis-lt509fb7e13bd25>. 29 Oktober 2012.
- Trianto, Diki. “Selain Lukas Enembe, Prodewa Desak Pejabat Elite Korup di Papua Diusut.” <https://hukum.rmol.id/read/2022/09/27/548817/selain-lukas-enembe-prodewa-desak-pejabat-elite-korup-di-papua-diusut>. 27 September 2022.
- Utami, Silmi Nurul. “Dampak Korupsi dan Hukumannya.” <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/22/090000269/dampak-korupsi-dan-hukumannya>. 22 November 2021.
- YUD. “Eksekusi Aset Terkait Korupsi Kondensat, Jaksa Agung Sudah on the Right Track.” <https://www.beritasatu.com/archive/496037/eksekusi-aset-terkait-korupsi-kondensat-jaksa-agung-sudah-on-the-right-track>. 15 Juli 2020.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ansori, S.H., M.H. pada 23 November 2021.

Wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Dedeo pada 30 April 2022.

Wawancara dengan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H. pada 13 Juni 2022.

Wawancara dengan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H. pada 18 November 2021.

Wawancara dengan Kartika Damayanti pada 11 April 2022.

Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Satu Ketut pada 26 Maret 2022.

Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Rifai pada 20 April 2022.

Wawancara dengan Komisaris Polisi Subiyanto, S.H., M.H. pada 18 Juni 2022.

Wawancara dengan Komisaris Polisi Yudhi pada 20 Mei 2022.

